

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)



PEMERINTAH KOTA BENGKULU KECAMATAN SINGARAN PATI TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN merupakan persyaratan bagi setiap pelaksana Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan pencapaian tujuan dan sasaran Instansi, untuk itu diperlukan adanya pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang akuntabel dan transparan, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pasal 2 ayat (1) diamanatkan bahwa Penyelenggaraan SAKIP dilakukan untuk menyusun Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan pada pasal 2 ayat (2) ditegaskan bahwa Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Hal ini merupakan langkah awal untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, terpercaya serta berorientasi pada hasil. Sehubungan dengan itu diperlukan

penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur yang diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan berbasis kinerja sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik, berdaya guna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari KKN.

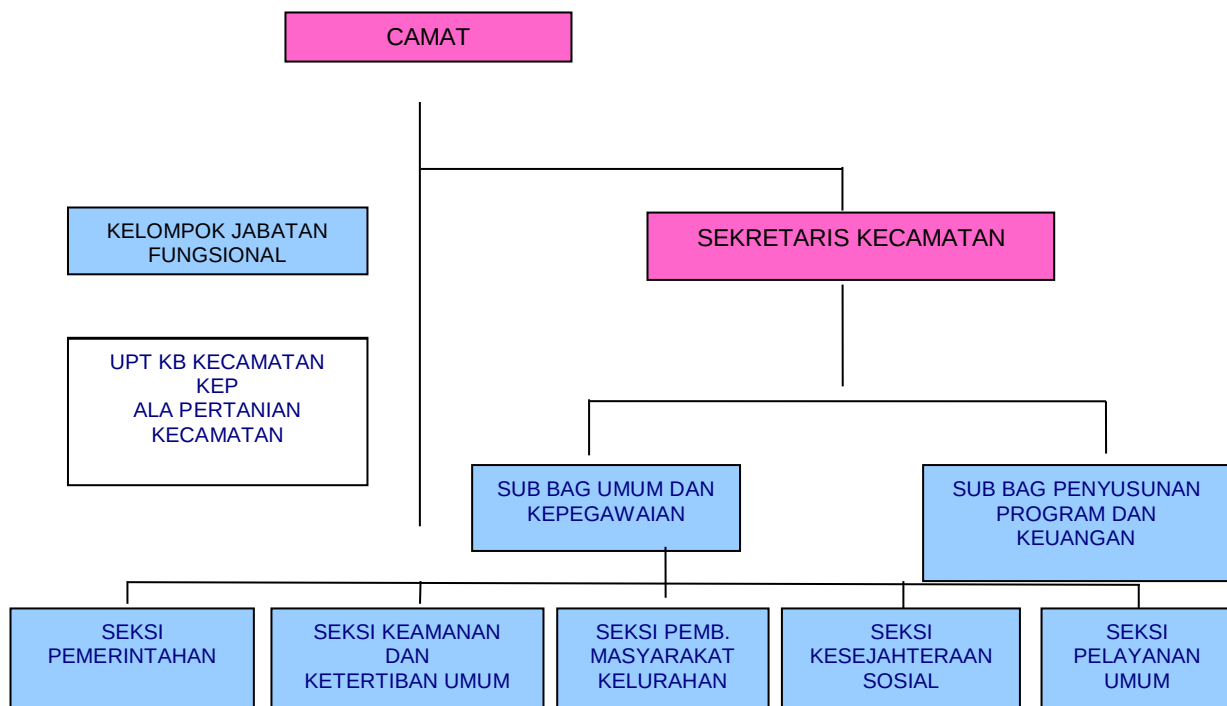
Sebagai wujud pertanggung jawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Kinerja yang juga merupakan instrument SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah Kecamatan Singaran Pati untuk mempertanggungjawabkan hasil kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

1.1. Struktur Organisasi Kecamatan Singaran Pati

Kantor Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor : 03 Tahun 2011 Tanggal 16 Maret 2011 dengan pusat pemerintahan di Kelurahan Surabaya merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut :

Struktur Organisasi Kecamatan Singaran Pati



1.2. Fungsi dan Tugas Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu

Berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 45).

Tugas Pokok

Kecamatan Singaran Pati merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota dan mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota bidang Pemerintahan dan Pelayanan Kepada Masyarakat dan dengan sendirinya memerlukan dukungan kemampuan Sumber Daya yang professional serta memadai guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas fungsi dan kewenangan Kantor Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu.

Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 58 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bengkulu adapun tugas pokok Camat sebagai Kepala Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota adalah mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota untuk

melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota.

Organisasi Pemerintah Kecamatan terdiri dari :

- a. Kepala Kecamatan
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial
- g. Seksi Pelayanan Umum

Dalam melaksanakan tugasnya Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi atas segala kegiatan Pemerintahan di wilayah kerjanya.

Dalam melaksanakan tugasnya Lurah, Sekretaris Kelurahan dan Kepala seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi atas segala kegiatan Pemerintahan di wilayah kerjanya.

Hubungan Kerja Pemerintahan Kecamatan dengan Pemerintahan Kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif.

Setiap pimpinan satuan kerja organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Setiap pimpinan satuan kerja organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Setiap pimpinan satuan kerja organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala maupun sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Organisasi Pemerintah Kelurahan terdiri dari :

- a. Kepala Kelurahan
- b. Sekretaris Kelurahan
- c. Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum
- d. Seksi Pembangunan
- e. Seksi Pelayanan Umum

Dalam melaksanakan tugasnya Lurah, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi atas segala kegiatan pemerintahan di wilayah kerjanya.

Setiap pimpinan satuan kerja organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kelurahan wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Setiap pimpinan satuan kerja organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kelurahan bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Setiap pimpinan satuan kerja organisasi dalam lingkungan Pemerintahan Kelurahan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala maupun sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

1.3. Isu Strategis

Kecamatan Singaran Pati merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota dan mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota

bidang Pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan Pelayanan Kepada Masyarakat dengan berpedoman kepada Standar Pelayanan yang telah ditetapkan agar dapat memberikan pelayanan administrasi umum secara maksimal. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kecamatan dibantu dengan kelurahan yang ada di wilayah kecamatan yang secara bersama-sama melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan merencanakan pembangunan dan pengembangan di masyarakat.

Pelayanan publik yang berkualitas atau yang biasa disebut dengan pelayanan prima merupakan pelayanan terbaik yang memenuhi standar kualitas pelayanan. Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014, komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi Persyaratan, prosedur, jangka waktu pelayanan, biaya/tarif, produk pelayanan, dan penanganan pengaduan. Jika suatu Instansi pemerintah dan lembaga lainnya mampu menerapkan standar kualitas tersebut maka sudah dapat dikatakan bahwa Instansi

pemerintah dan lembaga tersebut telah memberikan kualitas pelayanan yang baik.

Pelayanan administrasi umum di kecamatan merupakan segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga negara atau penduduk atas pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan kecamatan yang terkait dengan kepentingan administrasi umum. Contoh pelayanan publik dalam bentuk pelayanan administrasi yaitu perekaman e-KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) dan lain sebagainya.

Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat mengenai diskriminasi pelayanan. Sebagai contoh adanya masyarakat yang dipersulit ketika mengurus KTP (Kartu Tanda Penduduk) di instansi pemerintah seperti dikenakan biaya ekstra untuk mendapatkan pelayanan yang lebih cepat. Selain itu keluhan lain yang diungkapkan pengguna layanan yaitu adanya ketidakpastian waktu sehingga mengakibatkan rendahnya kualitas pelayanan. Ketidakpastian waktu dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap Instansi pemerintah tersebut. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat, maka

Kecamatan Singaran Pati perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan.

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan dimana masyarakat bernisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Di sisi lain, salah satu kata kunci pada saat ini yang sering didengungkan oleh semua lapisan masyarakat adalah kata peningkatan sumberdaya manusia. Kata tersebut mempunyai makna lebih spesifik lagi menyangkut bagaimana mengangkat kondisi masyarakat yang ada menjadi lebih baik dimasa mendatang.

Masyarakat dalam sebuah pemerintahan sangat besar perannya, keikutsertaan atau keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemerintah terkait kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan hal penentu berhasil atau tidaknya kebijakan tersebut. Pengambilan keputusan dalam sebuah kebijakan diperlukan peran serta masyarakatnya agar pemenuhan hak dari masyarakat bisa terpenuhi. Aktifnya masyarakat akan mempermudah tercapainya target pemerintah dimana target tersebut juga akan dirasakan oleh masyarakat manfaatnya. Selain masyarakat ada juga hal yang perlu diberdayakan, yakni aspek kelembagaan masyarakat. Lembaga merupakan wadah masyarakat untuk bisa ikut serta dalam sebuah kegiatan. Memanfaatkan kelembagaan yang ada atau menciptakan lembaga

masyarakat merupakan langkah yang tepat mempermudahnya proses tercapainya tujuan dari kebijakan pemberdayaan masyarakat. Semua itu tetap yang menyelenggarakan adalah pihak pemerintah dan masyarakat sebagai objek yang ditujukan harus diarahkan dan diawasi agar bisa selalu dalam koridornya. Pemerintah hanya perlu mengoptimalkan daya yang ada di masyarakat dengan memfasilitasi masyarakat melalui pelayanan umum yang disediakan.

Dari uraian diatas secara umum dapat disimpulkan isu strategis yang ada di Kecamatan Singaran Pati adalah : “ **Sulitnya akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan dan layanan pemerintahan serta masih rendahnya kapasitas SDM di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**”.

1.4. Keadaan Pegawai

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kecamatan dilaksanakan dengan sumber daya pegawai yang ada di kecamatan.

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai Tahun 2022 Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional

No	Jabatan	Jumlah (org)
1	Eselon II	0
2	Eselon III	2
3	Eselon IV	33
4	Fungsional Umum dan Fungsional tertentu	23
	JUMLAH	58

Jumlah pegawai yang ada di kecamatan dan kelurahan sebanyak 58 pegawai, berdasarkan jabatan struktural dan fungsional terdapat sebanyak 2 (dua) orang pegawai menduduki jabatan eselon III, sebanyak 33 (Tiga puluh tiga) orang menduduki jabatan eselon IV dan terdapat 23 (Dua Puluh Tiga) pegawai yang menduduki jabatan fungsional umum.

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Kecamatan Singaran Pati 2022 Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah (orang)
1	Golongan I	4
2	Golongan II	7
3	Golongan III	42
4	Golongan IV	5
	JUMLAH	58

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 58 (lima puluh delapan) pegawai yang ada terdiri dari Pegawai golongan I sebanyak 4 (empat pegawai, pegawai golongan II sebanyak 7 (tujuh) orang pegawai, pegawai golongan III sebanyak 42 (empat puluh dua) pegawai dan pegawai golongan IV sebanyak 5 (Lima) pegawai.

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Kecamatan Singaran Pati Tahun 2022 berdasarkan kualifikasi Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Strata 3 (S3)	0
2	Strata 2 (S2)	2
3	Strata 1 (S1)	36
4	Diploma III (D-III)	3
5	Diploma II (D-II)	0
6	SLTA	14
7	SLTP	2
8	SD	1
	JUMLAH	58

Dari tabel 1.3 di atas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan pegawai yang ada di Kecamatan Singaran Pati dari 58 (lima puluh delapan) pegawai yang ada hanya terdiri dari dua jenis jenjang pendidikan yaitu pendidikan Strata I (S1) sebanyak 36 (tiga puluh enam) pegawai dan tingkat pendidikan SLTA sebanyak 14 (Empat belas) pegawai

Tabel 1.4 Jumlah Pegawai Kecamatan Singaran Pati berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
1	Laki – Laki	28 orang
2	Perempuan	30 orang
	JUMLAH	58 orang

Jumlah pegawai menurut jenis kelamin terdiri dari 28 pegawai laki-laki dan 30 orang pegawai perempuan.

1.5. Keadaan Sarana dan Prasarana di Kecamatan Singaran Pati

Sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan di Kecamatan Singaran Pati dapat dilihat pada tabel di bawah, secara umum sarana yang ada dalam kondisi baik.

Tabel 1.5 Jenis Sarana dan Prasarana Di Kecamatan Singaran Pati

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah (unit)	Kondisi
1	Sepeda Motor	3 unit	Baik
2	Ruang rapat	1 ruangan	Baik
3	PC Unit	6 unit	Baik
4	Laptop	5 unit	Baik

Alat transportasi yang dimiliki kecamatan terdiri dari kendaraan dinas roda dua sebanyak 2 (tiga) unit, dan kendaraan dinas roda empat sebanyak 2 (Tiga) unit terdiri dari 2 unit Ambulance kecamatan dan 1 unit minibus. Fasilitas lain yang terdapat di kecamatan terdiri dari Ruang kerja pelayanan terdiri dari 6 ruangan kantor kecamatan dan 6 kelurahan, 1 ruang rapat, 5 unit komputer dan 4 unit laptop.

1.6. Keuangan

Anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Singaran Pati pada tahun 2022 berasal dari APBD Kota Bengkulu. Pada Tahun Anggaran 2022 Kecamatan Singaran Pati mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.113.492.110,- dengan alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 5.919.044.910,- dan belanja langsung sebesar Rp.1.165.897.200,- yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung.

1.7. Sistematika LKjIP

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Singaran Pati Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusunnya LKjIP/manfaat LKjIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan Singaran Pati dan sistematika penyusunan LKjIP

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin dicapai instansi Kecamatan Singaran Pati pada tahun 2022

serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi misi kepala daerah.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja dengan perbandingan data yang memadai, keberhasilan dan kegagalan serta permasalahan yang dihadapi serta langkah – langkah antisipatif yang akan diambil.

Selain itu disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana realisasi dan anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

BAB IV. PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi Kecamatan Singaran Pati serta alternatif pemecahannya.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin terjadi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bengkulu Tahun 2019-2023 Kota Bengkulu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bengkulu Tahun 2019-2023 pada tanggal 15 Mei 2019. Dalam dokumen RPJMD terlihat bahwa untuk mencapai tujuan Kepala Daerah yaitu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, Perangkat Daerah Kecamatan Singaran Pati memiliki tujuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan dengan sasaran meningkatnya pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan indikator sasaran Nilai Evaluasi LKjIP Kecamatan oleh Inspektorat Kota Bengkulu dengan target pencapaian pada tahun 2022 dengan nilai sebesar 68.

Untuk mencapai indikator sasaran Kecamatan Singaran Pati sesuai dengan RPJMD direncanakan melaksanakan 2 (dua) program dengan 4(empat) indikator sasaran sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran KADA dan Perangkat Daerah

Tujuan KADA	Indikator Tujuan KADA	Sasaran KADA	Indikator Sasaran KADA	Sasaran PD Kecamatan Singaran Pati	Indikator Sasaran PD Kecamatan Singaran Pati	TARGET Tahun 2022	Program Kecamatan dalam RPJMD	Indikator Program
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya keterbukaan dan kualitas pelayanan publik	Rata-rata nilai kinerja unit penyelenggara pelayanan publik	Meningkatnya pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	Nilai Evaluasi KLJIP Kecamatan	70	1.Peningkatan Pengembangan kapasitas kecamatan dan kelurahan 2.Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan kelurahan	1.1. Persentase kelurahan berkinerja prima 2.1. Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang aktif 2.2. Persentase kelurahan yang menerapkan TTG

Dari penetapan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah Kecamatan Singaran Pati dan disesuaikan dengan RPJMD, disusunlah Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu yang ditetapkan dengan peraturan Walikota Bengkulu Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Bengkulu Tahun 2019-2023 pada tanggal 19 Juli 2019.

Dalam Jangka Menengah Kecamatan Singaran Pati memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan. Adapun tujuannya yaitu : *“Meningkatkan kualitas pelayanan publik di kecamatan ”*.

Sasaran Jangka menengah Kecamatan Singaran Pati sebagai berikut: *“Meningkatnya pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan”*. Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator kinerja sasaran, yaitu *nilai evaluasi LKjIP kecamatan*.

Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2019-2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2019	2022	2022	2022	2023
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dikecamatan	Meningkatnya pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	Nilai evaluasi LKjIP Kecamatan	68	70	71	73	74

2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra maka ditetapkanlah Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) PD Kecamatan Singaran Pati

N o	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Indika tor Sasaran	Formula/ Rumus	Sumber Data
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dikecamatan	Meningkatnya pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	Nilai evaluasi LKjIP Kecamatan	Nilai LKjIP	Inspektorat Kota Bengkulu

2.3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Pada tahun 2022 ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang memuat 7(tujuh) program yang meliputi Program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, peningkatan pengembangan sistem capaian kinerja dan keuangan, Pemberdayaan masyarakat kecamatan, Pelayanan

Administrasi Pemerintahan Kelurahan, pengembangan kapasitas kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. Uraian dari masing – masing program dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Singaran Pati Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program	Indikator Program	Target Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan/ Output	Target Output	Anggaran
1	Meningkatnya pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	Nilai Evaluasi LKjIP Kecamatan	68	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos dan materai yang tersedia	999 lembar materai	1.500.000
							Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah tagihan listrik dan internet	12 bulan (1 meteran listrik dan 1 jaringan wifi)	22.680.000
							Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah servis peralatan dan perlengkapan kantor	2 jenis (AC, Printer)	3.570.000
							Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dengan baik	2 kendaraan roda 4 dan 2 kendaraan dinas roda 2	78.165.000
							Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pelaksanaan penatausahaan keuangan dan barang milik daerah yang dibayarkan honorarium setiap bulannya	96 OB (PA, PPTK, Bend Pengeluaran, PPKeuangan, PPBarang, Penyimpan barang)	90.240.000

							Penyediaan ATK	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	31 Jenis	13.589.500
							Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	4 jenis	7.982.400
							Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik penerangan	6 jenis	2.500.000
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8 Jenis	0
							Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar yang tersedia setiap bulannya	3 jenis , 600 eksemplar	2.500.000
							Penyediaan Makan dan Minum	Jumlah Makan dan Minum	12 Bulan	6.480.000
							Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	4 OK	51.900.000
							Penyediaan jasa pendukung administrasi /keamanan/teknis perkantoran	Jumlah pegawai tidak tetap yang dipekerjakan	5 orang	94.248.000
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100%	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah rehab gedung kantor	1 gedg kantor	19.300.000
				Program Peningkatan Disiplin aparatur	Persentase Peningkatan disiplin aparatur	100%	Penyediaan Pakaian Khusus hari tertentu	Jumlah Pakaian yang tersedia	32 Orang	19.500.000
				Program Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Kecamatan yang	100%	Bulan bhakti gotong royong	Jumlah BBGRM yang diselenggarakan	6 kelurahan	

				Kecamatan	bekinerja prima					
							Pembinaan GSI	Jumlah pembinaan GSI yang diselenggarakan	6 kelurahan	0
							Musrenbang Kecamatan	Jumlah Musrenbang Kecamatan	1 kali 50 Peserta	13.500.00
							Peningkatan dan Pembinaan TP PKK	Jumlah Tim Penggerak PKK yang dibangun	1 TP PKK Kecamatan, 4 Pokja	16.800.400
							Safari Ramadhan	Jumlah Kegiatan Safari ramadhan	6 Kelurahan	10.030.000
							Lomba Kelurahan	Jumlah lomba kelurahan yang diselenggarakan	6 kelurahan	0
							Penunjang Pelaksanaan Adipura	Jumlah kegiatan penunjang yang dilaksanakan dalam penilaiann adipura	12 bulan	0
							Pembinaan Poskamling	Jumlah kegiatan poskamling	12 bulan	0
							Pembinaan Kota Sehat	Jumlah pembinaan kota sehat yang dilakukan	6 kelurahan	0
							Penyusunan Buku Profil	Jumlah profil kecamatan yang disusun	1 dokumen	0
							Pengiriman Peserta MTQ dan Pawai Mobil Hias	Jumlah Lomba MTQ dan Pawai Mobil yang diikuti	50 peserta, Pawai, 2 mobil hias	15,000,000
							Fasilitasi Posko Pemilu Kecamatan	Jumlah Posko Pemilu di Kecamatan	1 posko	0
							Pendataan dan Pembinaan Guru Ngaji, Da'l dan Mubalik Imam, Khatib, Bilal, Gharim dan	Tersedianya operasional uang lelah guru ngaji, da'l dan mubalik Imam, Khatib,	252 OB 6 kelurahan	154.800.000

							Rubiya Kelurahan	Bilal, Gharim Rubiyah kelurahan		
				Program Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan	Persentase kelurahan yang bekinerja prima	100%	Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Panorama	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan kelurahan	31 RT, 3 RW, 9 Linmas, 1 Ketua Adat	420.797.800
							PPenyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Jembatan Kecil	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan kelurahan	11 RT, 3 RW, 11 Linmas, 1 Ketua Adat	232.737.200
							Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Dusun Besar	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan kelurahan	28 RT, 7 RW, 11 Linmas, 1 Ketua Adat	375.714.600
							Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Padang Nangka	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan kelurahan	23 RT, 6 RW, 11 Linmas, 1 Ketua Adat	330.598.00
							Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Timur Indah	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan kelurahan	31 RT, 6 RW, 11 Linmas, 1 Ketua Adat	247.713.600
							Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Lingkar Timur	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan kelurahan	27 RT, 3 RW, 8 Linmas, 1 Ketua Adat	373.799.120

				Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Persentase LPM berprestasi dan rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	100%	Pembinaan dan Fasilitas LPM dan PKK Kelurahan Panorama	Pembinaan dan Fasilitas LPM dan PKK Kelurahan	12 bln, 1 LPM dan 1 PKK kel	29.981.800
							Pembinaan dan Fasilitas LPM dan PKK Kelurahan Jembatan Kecil	Pembinaan dan Fasilitas LPM dan PKK Kelurahan	12 bln, 1 LPM dan 1 PKK kel	29.600.400
							Pembinaan dan Fasilitas LPM Kelurahan Dusun Besar	Pembinaan dan Fasilitas LPM dan PKK Kelurahan	12 bln, 1 LPM dan 1 PKK kel	29.985.200
							Pembinaan dan Fasilitas LPM Kelurahan Padang Nangka	Pembinaan dan Fasilitas LPM dan PKK Kelurahan	12 bln, 1 LPM dan 1 PKK kel	26.765.400
							Pembinaan dan Fasilitas LPM Kelurahan Timur Indah	Pembinaan dan Fasilitas LPM dan PKK Kelurahan	12 bln, 1 LPM dan 1 PKK kel	28.965.000
							Pembinaan dan Fasilitas LPM Kelurahan Lingkar Timur	Pembinaan dan Fasilitas LPM dan PKK Kelurahan	12 bln, 1 LPM dan 1 PKK kel	26.854.000
5										7.113.492.110

2.4. Perjanjian Kinerja (PK)

Untuk mencapai Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kecamatan Singaran Pati dan didasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2022 maka disusunlah perjanjian kinerja tahun 2022. Perjanjian Kinerja Kecamatan Singaran Pati disusun berdasarkan Program dan Kegiatan yang ada dalam DPA Kecamatan Singaran Pati Nomor

35/DPPA/BPKAD/2022 Tanggal 04 Januari 2022. Penyusunan program dan kegiatan yang ada masih mengacu pada program dan kegiatan Tahun 2019 (Renstra 2019-2023), hal ini dikarenakan Renstra 2019-2023 telah di syahkan dan sudah ada Peraturan Daerah yang menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bengkulu Tahun 2019-2023.

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 SKPD Kecamatan Singaran Pati

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	Nilai Evaluasi LKjIP Kecamatan	70
2.			

Indikator kinerja keberhasilan Perangkat Daerah Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu tahun 2022 dapat dilihat pada di atas, dijabarkan adalah sebagai berikut:

Untuk Meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan indikator kinerja yaitu “Nilai Evaluasi LKjIP Kecamatan“, dengan target nilai sebesar 68

yang evaluasinya dilakukan oleh Pemerintah Kota Bengkulu
Melalui Inspektorat Kota Bengkulu

Adapun Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan
sesuai dengan Perjanjian Kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.6 Program dan Kegiatan Tahun 2022

Program	Anggaran
.Pelayanan Administrasi Perkantoran	216.936.800
Peningkatan Displin Aparatur	19.500.000
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000
Pengembangan kapasitas Kecamatan	506.086.400
Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan	1.981.360.320
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	172.151.800
JUMLAH	2.906.035.320

Dari tabel 2.6 di atas dapat dilihat jumlah Anggaran Tahun 2022
sebesar Rp. 2.906.035.320,- (Dua Miliar Sembilan Ratus Enam Juta
Tiga Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah) dengan program
yang akan dilaksanakan sebanyak 7(Tujuh) program.

Dari Perjanjian Kinerja tersebut ditetapkanlah program dan
kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 melalui Perjanjian
Kinerja Tahun 2022 Perangkat Daerah Kecamatan Singaran Pati Kota
Bengkulu.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Singaran Pati disusun
berdasarkan Program dan Kegiatan yang ada dalam DPA Kecamatan

Singaran Pati Nomor 36/BPKAD/2022 Tanggal 2 Januari 2022. Penyusunan program dan kegiatan yang ada masih mengacu pada program dan kegiatan Tahun 2019 (Renstra 2019-2023), hal ini dikarenakan Renstra 2019-2023 belum di syahkan dan belum ada Peraturan Daerah yang menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bengkulu Tahun 2019-2023. RPJMD Kota Bengkulu baru ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bengkulu Tahun 2019-2023 pada tanggal 15 Mei 2022.

Penyusunan Renstra baru dimulai dengan berpedoman pada RPJMD yang sudah ditetapkan. Renstra Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu ditetapkan dengan peraturan Walikota Bengkulu Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Bengkulu Tahun 2019-2023 pada tanggal 19 Juli 2022.

Dampak dari penyusunan DPA berpedoman dengan program dan kegiatan tahun sebelumnya mengakibatkan terdapat beberapa program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan RPJMD 2019-2023 dan Renstra Kecamatan Singaran Pati Tahun 2019-2023

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam mengukur capaian indikator kinerja Kecamatan Singaran Pati Tahun 2022 didasarkan pada ketentuan yaitu :

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target indikator kinerja adalah :

$$\text{Capaian IKU} = \text{Realisasi} / \text{Target} \times 100 \%$$

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik.

Rumus tersebut akan digunakan dalam menetapkan persentase pengukuran indikator kinerja untuk persentase capaian realisasi fisik. Semakin tinggi nilai persentase capaian realisasi yang diperoleh menunjukkan capaian kinerja yang semakin baik yang pada akhirnya mendukung tercapainya sasaran, tujuan, misi dan visi Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu yang telah ditetapkan.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam evaluasi ini juga diuraikan hal-hal yang mendukung keberhasilan sekaligus hal-hal yang menghambat sehingga menimbulkan kegagalan pencapaian target. Diupayakan pula menginventarisir langkah-langkah antisipasi yang akan dilakukan sehingga kinerja pemerintah semakin baik.

3.1.1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Dari Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Perangkat Daerah Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dalam pelaksanaannya,

secara umum realisasi pencapaian target kinerja belum mencapai target yang telah ditetapkan karena pengukuran belum bisa dilakukan sehingga pencapaiannya hanya sebesar 0 %. *Capaian dari indikator kinerja sasaran* tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Kecamatan Singaran Pati Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
Meningkatnya pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	Nilai Evaluasi LKjIP Kecamatan	70	0	0

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada Sasaran strategis Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu Tahun 2022 yaitu Meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan indikator Nilai Evaluasi LKjIP Kecamatan dengan target pencapaian pada perjanjian kinerja awal sebesar 70 sedangkan pencapaian realisasinya sebesar 0 Dengan demikian hasil

pengukuran kinerja Kecamatan Singaran Pati secara umum belum tercapai.

Keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Singaran Pati dapat kita lihat dari *realisasi capaian kinerja program* yang dilaksanakan perangkat daerah Kecamatan Singaran Pati untuk pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Bengkulu. Terdapat 2 (dua) Sasaran/Program Pembangunan Daerah yang akan dilaksanakan oleh kecamatan dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kecamatan Singaran Pati dalam Program Pembangunan Daerah Tahun 2022

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Program Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja Program Tahun 2022	%
1	Program Peningkatan Pengembangan Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kelurahan yang berkinerja prima	90	100	100

2	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang aktif	100	100	100
		Persentase kelurahan yang menerapkan TTG	40	0	0

Dari Tabel 3.2 dapat dilihat bahwa terdapat 2(dua) sasaran/program pembangunan daerah yang dilaksanakan Kecamatan Singaran Pati yaitu Program Peningkatan Pengembangan Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan dan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan.

Pada Program Peningkatan Pengembangan Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan dengan indikator capaian kinerja program adalah persentase kelurahan yang berkinerja prima dengan target capaian kinerja sebesar 50% dan realisasi sebesar 100% dan capaian kinerja sebesar 200%, dengan demikian dapat dikatakan bahwa

capaian kinerja program Peningkatan Pengembangan Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan sudah berhasil dan telah melebihi target yang sudah ditetapkan.

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan dengan indikator kinerja persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang aktif mempunyai target capaian kinerja program sebesar 100% dan capaian realisasi sebesar 100%. Dengan demikian capaian kinerja program ini sudah sesuai yang diharapkan dan dapat dikatakan berhasil. Sedangkan pada indikator capaian kinerja program yaitu persentase kelurahan yang menerapkan TTG dengan target capaian kinerja sebesar 40% dan tingkat capaian realisasi kinerja program sebesar 0% sehingga dapat dikatakan bahwa Kecamatan Singaran Pati belum berhasil dalam mencapai target terhadap persentase kelurahan yang menerapkan TTG.

3.1.2. Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019 dan 2022

Capaian kinerja Kecamatan Singaran Pati pada tahun 2019 dan tahun 2022 tidak dapat dibandingkan karena sudah berbeda periode renstra yaitu antara renstra 2019-2023 dan renstra 2022-2023, sehingga terdapat perbedaan antara indikator sasaran perjanjian kinerja dari tahun 2019 dan 2022. Pada tahun 2019 indikator sasaran kecamatan Singaran Pati yang tercantum dalam

perjanjian kinerja dan realisasi capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3 Pengukuran Kinerja Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Yang Tepat Waktu	90%	89,39%	99,32%
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kelompok masyarakat	Persentase program/kegiatan dari usulan masyarakat (kelurahan) yang direkomendasikan di tingkat kecamatan	90%	100%	111,11%
	Persentase organisasi kemasyarakatan tingkat kecamatan yang aktif	90%	100%	111,11%
	Persentase poskamling yang aktif	55%	45,23%	82,23%

Pada tahun 2022 terdapat 4 indikator sasaran dalam perjanjian kinerja yaitu persentase pelayanan administrasi umum yang tepat waktu, persentase program/kegiatan dari usulan masyarakat (kelurahan) yang direkomendasikan di tingkat kecamatan, persentase organisasi kemasyarakatan tingkat kecamatan yang aktif dan persentase poskamling yang aktif dengan capaian persentase masing – masing indikator rata – rata telah mencapai diatas 82 % dan dapat dikatakan bahwa pengukuran kinerja kecamatan secara umum dapat dikatakan berhasil

Pada tahun 2022 yang merupakan awal periode renstra tahun 2019-2023, yang menjadi indikator sasaran dari perjanjian kinerja kecamatan hanya terdapat satu indikator yaitu *nilai evaluasi LKjIP Kecamatan* yang pada tahun 2022 ini masih bernilai 0 karena belum ada penilaian atas nilai evaluasi LKjIP Kecamatan Singaran Pati Tahun 2018 yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bengkulu melalui Inspektorat Kota Bengkulu.

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Tahun 2018 dan 2022

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA 2018	CAPAIAN KINERJA		% CAPAIAN 2022
				2018	2022	
1	Nilai Evaluasi LKjIP Kecamatan	-	68	0	0	0

Dari perbedaan indikator sasaran pada tahun 2018 dan 2022 maka tidak dimungkinkan untuk membandingkan target capaian kinerja Kecamatan Singaran Pati.

3.1.3. Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Target Jangka Menengah

Tahun 2022 merupakan tahun awal periode Renstra Kecamatan Singaran Pati Tahun 2019-2023. Target yang telah ditetapkan dalam Dokumen Renstra tersebut meningkat dari tahun ke tahun, pada sasaran Meningkatnya pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan indikator kinerja Nilai Evaluasi LKjIP Kecamatan menunjukkan bahwa target

kinerja pada tahun 2022 ini sebesar 70 dengan tingkat realisasi sebesar 0, hal ini disebabkan karena Inspektorat Kota Bengkulu belum melakukan penilaian atas penyusunan LKjIP Kecamatan Singaran Pati Tahun 2019 dan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Kinerja 2022 dengan Target Dalam Renstra

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tahun Ke-					Capaian Kinerja Tahun 2022
				2019	2022	2022	2022	2023	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Meningkatnya Pelayanan Di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	Nilai Evaluasi LKjIP Kecamatan	68	70	71	73	74	0

Dari tabel 3.5 di atas dapat dilihat bahwa dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kecamatan Singaran Pati ditandai dengan indikator tujuan/sasaran Nilai Evaluasi LKjIP Kecamatan berdasarkan Renstra Kecamatan Tahun 2019-2023 dengan target kinerja pada tahun 2019 sebesar 68, pada tahun 2022 sebesar 70, pada tahun 2022 sebesar 71, pada tahun 2022 sebesar 73 dan pada tahun 2023 yang merupakan akhir periode Renstra sebesar 74. Tahun 2022 ini merupakan awal periode Renstra dengan target kinerja sebesar 68

dan pencapaian realisasinya sebesar 0 dan belum memenuhi target yang sudah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan.

3.1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi yang Dilakukan

Secara rinci, pencapaian kinerja Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu Tahun 2022, Sasaran Strategis Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu yaitu "Meningkatnya Pelayanan Di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan" dijabarkan kedalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu *Nilai Evaluasi LKjIP Kecamatan* .

a. Analisis Pencapaian Indikator Sasaran Nilai Evaluasi LKjIP Kecamatan

Sasaran Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu untuk "Meningkatnya Pelayanan Di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan" dijabarkan kedalam **1 (satu) indikator kinerja**, yaitu Nilai Evaluasi LKjIP Kecamatan.

Pada tahun 2022 ini Capaian kinerja Kecamatan Singaran Pati masih belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan karena belum ada penilaian yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bengkulu melalui Inspektorat Kota Bengkulu atas penyusunan LKjIP Kecamatan Singaran Pati Tahun 2018. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator sasaran Nilai Evaluasi LKjIP Kecamatan belum berhasil. Penyebab belum

tercapainya indikator sasaran ini bukan karena kesalahan dari Perangkat Daerah Kecamatan Singaran Pati, karena Kecamatan Singaran Pati telah membuat LKjIP 2019 akan tetapi kebijakan dari Pemerintah Daerah Kota Bengkulu yang belum memberikan penilaian atas pencapaian indikator sasaran dengan belum melakukan penilaian atas penyusunan LkjiP Kecamatan Singaran Pati Tahun 2019. Meskipun demikian Kecamatan Singaran Pati akan terus mengupayakan agar seluruh tugas dan fungsi kecamatan berjalan dengan baik dan tahun mendatang diharapkan Inspektorat Kota Bengkulu akan melakukan penilaian atas penyusunan LkjiP 2022 sehingga target Capaian Indikator sasaran dapat terpenuhi pada tahun 2022.

b. Analisis Indikator Capaian Program

Sasaran/Program Pembangunan Daerah yang ada di Kecamatan Singaran Pati terdiri dari 2 (dua) program dengan indikator kinerja serta penyebab keberhasilan/kegagalan dan alternatif solusinya dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1. Program Peningkatan Pengembangan Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan** dengan indikator kinerja program yaitu persentase kelurahan yang berkinerja prima dengan target sebesar 50 % dan capaian kinerja program sebesar 200%. Hal ini ditandai dengan keberhasilan dari 7 (tujuh) kelurahan dalam melaksanakan tugasnya dalam melayani

masyarakat. Dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat selama tahun 2022 tidak terdapat keluhan masyarakat atas kinerja kelurahan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa dapat disimpulkan pencapaian kinerja program pada persentase kelurahan yang berkinerja prima dikatakan berhasil. Keberhasilan kinerja ini juga didukung dengan sumberdaya pegawai yang ada di kelurahan dalam melakukan pelayanan dan ketersediaan fasilitas pelayanan serta dukungan anggaran dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selain itu juga keaktifan dari seluruh kelurahan dalam mengikuti kegiatan yang ada di kecamatan dan peran serta kelurahan dalam lomba baik yang dilaksanakan di kecamatan seperti lomba kelurahan maupun lomba di tingkat Kota Bengkulu. Dukungan terhadap kinerja kelurahan berasal dari seluruh unsur masyarakat dan tokoh masyarakat, RT,RW dan perangkat kelurahan dalam mengikuti seluruh kegiatan yang ada.

Untuk lebih meningkatkan kinerja kelurahan di masa yang akan datang diupayakan koordinasi yang baik antar seluruh komponen yang terkait baik dari segi perencanaan, pemberian pelayanan serta terus menambah fasilitas penunjang pelayanan dan memelihara fasilitas yang telah tersedia serta memanfaatkan dukungan anggaran yang tersedia seefisien

mungkin dengan hasil yang semaksimal mungkin. Selain itu juga diupayakan peningkatan sumber daya pegawai dalam penerapan teknologi terkait pelayanan agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal.

2. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan

Pada Indikator Capaian Kinerja Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan terdapat 2 (dua) Indikator kinerja dengan tingkat keberhasilan/kegagalan dapat dilejaskan sebagai berikut :

a. Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang aktif

Target capaian kinerja program pada persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang aktif pada tahun 2022 sebesar 100% dengan tingkat realisasi sebesar 100%. Secara umum Kecamatan Singaran Pati telah dapat mencapai target yang telah ditetapkan sehingga dapat dikatakan berhasil. Keberhasilan ini ditandai dengan keaktifan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang ada di kelurahan dimana masing-masing kelurahan terdapat 1 lembaga LPM yang menaungi seluruh kegiatan kemasyarakatan yang ada di kelurahan tersebut. Peran aktif LPM dalam kegiatan kemasyarakatan mulai dari musyawarah dalam melaksanakan

perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, kebersihan lingkungan, perayaan hari-hari besar yang dijalankan bersama-sama di kelurahan. Keterlibatan LPM sangatlah berperan dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan baik pembangunan fisik maupun non fisik. Selain itu juga LPM sebagai wadah pengkoordinasian seluruh lembaga yang ada di kelurahan seperti PKK, karang taruna, majelis taklim, lembaga keagamaan dan lembaga lainnya. Keberhasilan pencapaian kinerja program ini dengan *faktor pendukung* sebagai berikut :

- ketersediaan anggaran yang menunjang pelaksanaan kegiatan LPM yang ada di kelurahan terutama dalam kebersihan lingkungan karena terdapat dukungan anggaran setiap kelurahan untuk memfasilitasi operasional kendaraan roda tiga yang digunakan untuk kebersihan lingkungan dan operasional petugasnya, serta dukungan anggaran untuk pemeliharaan fasilitas umum yang ada.
- Sumberdaya pengurus LPM dan masyarakat yang selalu aktif dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan di kelurahan.

- Pengkoordinasian dan kerjasama yang baik antar seluruh komponen RT, RW, Perangkat Kelurahan dan masyarakat.
- Keterlibatan Seluruh unsur masyarakat dalam kegiatan LPM.
- Keterbukaan atas pelaksanaan kegiatan yang telah dijalankan.

Faktor *Penghambat keberhasilan* capaian kinerja program persentase LPM yang aktif adalah :

- Kurangnya pemahaman sebagian kecil masyarakat akan kegiatan yang dilaksanakan oleh LPM sehingga kadang-kadang terjadi pro dan kontra.
- Kurangnya kepercayaan terhadap kinerja LPM.

Untuk mengatasi hal tersebut maka diupayakan hal – hal sebagai berikut :

- Terus memberikan pengarahan dan pengertian kepada masyarakat akan pentingnya pelaksanaan kegiatan yang ada.
- Keterbukaan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan yang dilakukan.
- Selalu berkoordinasi dengan seluruh komponen masyarakat untuk menghimpun aspirasi yang ada di masyarakat.

b. Persentase Kelurahan yang menerapkan TTG

Dalam Pencapaian Kinerja Program Persentase Kelurahan yang menerapkan TTG dengan realisasi sebesar 0 %. *Faktor Pengambat keberhasilan* ini antara lain :

- Belum adanya pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) yang dijalankan di kelurahan dalam wilayah Kecamatan Singaran Pati.
- Belum adanya dukungan anggaran untuk melaksanakan kegiatan baik sosialisasi maupun penerapan TTG di masyarakat.
- Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan TTG

Dari hambatan di atas, maka diupayakan hal-hal yang dapat menunjang pencapaian kinerja program persentase Kelurahan yang menerapkan TTG yaitu :

- Diupayakan dukungan anggaran yang dapat menunjang penerapan TTG di kelurahan
- Memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat mengenai Teknologi Tepat Guna (TTG)
- Menambah Pengetahuan kepada masyarakat akan pentingnya serta manfaat penerapan TTG di masyarakat.

3.1.5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang ada dalam menjalankan pemerintahan Kecamatan Singaran Pati

Kota Bengkulu untuk mencapai keberhasilan Capaian perjanjian kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2022 ini dan untuk meningkatkan pencapaian target tahun yang akan datang, maka diupayakan untuk dapat memanfaatkan sumberdaya secara efisien untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai target perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Efisiensi yang dapat dilakukan dalam hal sebagai berikut:

1. Efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya keuangan dengan menggunakan jumlah anggaran yang ada secara baik sesuai dengan peruntukannya secara efisien untuk menghasilkan kinerja yang semaksimal mungkin. Efisiensi juga mempertimbangkan jumlah program yang dilaksanakan harus disesuaikan dengan RPJMD Pemerintah Kota Bengkulu dan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.
2. Efisiensi dalam hal penggunaan sarana dan prasarana yang ada dikelurahan yang dapat menunjang pelayanan prima kepada masyarakat, sehingga tujuan kinerja kecamatan dengan menciptakan kelurahan yang berkinerja prima akan tercapai. Sarana dan prasarana yang digunakan agar diupayakan terpelihara dengan baik dan dimasa yang akan

datang untuk dapat menambah atau mengganti sarana dan prasarana dalam keadaan rusak sehingga tidak mengganggu proses pelayanan secara keseluruhan.

3. Efisiensi terhadap sumber daya pegawai yang ada di kelurahan dengan memanfaatkan sumber daya pegawai yang ada mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu diupayakan menambah pengetahuan pegawai dalam hal pemanfaatan teknologi yang menunjang pelayanan yang ada sehingga mampu memberikan pelayanan maksimal dan tepat waktu kepada masyarakat dengan demikian kinerja kecamatan dalam mencapai persentase kelurahan yang berkinerja prima akan terwujud dengan baik.

3.1.6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

3.1.6.1 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja program Persentase Kelurahan yang berkinerja prima

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi kelurahan untuk mencapai kinerja ini, kelurahan sebagai ujung tombak pelaksanaan ditunjang dengan program sebagai berikut :

- Program Pelayanan Administrasi pemerintahan kelurahan

Sedangkan kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Panorama yang meliputi penyediaan operasional RT,RW,Adat, Perangkat Kelurahan Linmas, operasional administrasi secara umum di kelurahan serta kelengkapan fasilitas penunjang pelayanan.
- Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Jembatan Kecil yang meliputi penyediaan operasional RT,RW,Adat, Perangkat Kelurahan Linmas, operasional administrasi secara umum di kelurahan serta kelengkapan fasilitas penunjang pelayanan.
- Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Dusun Besar yang meliputi penyediaan operasional RT,RW,Adat, Perangkat Kelurahan Linmas, operasional administrasi secara umum di kelurahan serta kelengkapan fasilitas penunjang pelayanan.
- Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Padang Nangka yang meliputi penyediaan operasional RT,RW,Adat, Perangkat Kelurahan Linmas, operasional administrasi secara umum di kelurahan serta kelengkapan fasilitas penunjang pelayanan.
- Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Timur Indah yang meliputi penyediaan operasional RT,RW,Adat, Perangkat Kelurahan Linmas, operasional

adminstrasi secara umum di kelurahan serta kelengkapan fasilitas penunjang pelayanan.

- Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Lingkar Timur yang meliputi penyediaan operasional RT,RW,Adat, Perangkat Kelurahan Linmas, operasional adminstrasi secara umum di kelurahan serta kelengkapan fasilitas penunjang pelayanan.

3.1.6.2. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja program Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang aktif

Program yang menunjang pencapaian kinerja ini adalah Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dengan kegiatan sebagai berikut:

Pembinaan dan Fasilitasi LPM kelurahan Panorama dengan melibatkan peran aktif Lembaga Pemberdayaan Masyarakat pada setiap kelurahan dalam pembangunan di kelurahan dan kegiatan lainnya yang melibatkan masyarakat secara umum seperti kebersihan lingkungan, keamanan, keindahan, pengkoordinasian kegiatan yang dilaksanakan di kelurahan seperti adat, perayaan dsb.

- Pembinaan dan Fasilitasi LPM kelurahan Jembatan Kecil dengan melibatkan peran aktif Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat pada setiap kelurahan dalam pembangunan di kelurahan dan kegiatan lainnya yang melibatkan masyarakat secara umum seperti kebersihan lingkungan, keamanan, keindahan, pengkoordinasian kegiatan yang dilaksanakan di kelurahan seperti adat, perayaan dsb.

- Pembinaan dan Fasilitasi LPM kelurahan Dusun Besar dengan melibatkan peran aktif Lembaga Pemberdayaan Masyarakat pada setiap kelurahan dalam pembangunan di kelurahan dan kegiatan lainnya yang melibatkan masyarakat secara umum seperti kebersihan lingkungan, keamanan, keindahan, pengkoordinasian kegiatan yang dilaksanakan di kelurahan seperti adat, perayaan dsb.
- Pembinaan dan Fasilitasi LPM kelurahan Padang Nangka dengan melibatkan peran aktif Lembaga Pemberdayaan Masyarakat pada setiap kelurahan dalam pembangunan di kelurahan dan kegiatan lainnya yang melibatkan masyarakat secara umum seperti kebersihan lingkungan, keamanan, keindahan, pengkoordinasian kegiatan yang dilaksanakan di kelurahan seperti adat, perayaan dsb.
- Pembinaan dan Fasilitasi LPM kelurahan Timur Indah dengan melibatkan peran aktif Lembaga Pemberdayaan

Masyarakat pada setiap kelurahan dalam pembangunan di kelurahan dan kegiatan lainnya yang melibatkan masyarakat secara umum seperti kebersihan lingkungan, keamanan, keindahan, pengkoordinasian kegiatan yang dilaksanakan di kelurahan seperti adat, perayaan dsb.

- Pembinaan dan Fasilitasi LPM kelurahan Lingkar Timur dengan melibatkan peran aktif Lembaga Pemberdayaan Masyarakat pada setiap kelurahan dalam pembangunan di kelurahan dan kegiatan lainnya yang melibatkan masyarakat secara umum seperti kebersihan lingkungan, keamanan, keindahan, pengkoordinasian kegiatan yang dilaksanakan di kelurahan seperti adat, perayaan dsb.

3.2. REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun Anggaran 2022 Kecamatan Singaran Pati mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.156.914.720,- dengan alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 5.988.989.800,- dan belanja langsung sebesar Rp. 2.125.894.650,- dengan realisasi belanja langsung sebesar Rp. 5.718.964.631,- dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.0627.711.256,- dengan total realisasi sebesar Rp. 7.882.256.657- atau sebesar 95,90 %. Penyerapan anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan ini sudah melebihi dari target yang ditetapkan karena realisasi untuk pembayaran belanja tidak langsung yang melebihi anggaran

disebabkan terjadinya kenaikan tunjangan dan gaji pegawai tahun 2022. Dari Total anggaran yang ada, yang diperuntukkan untuk mendukung pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut :

Tabel 3.6 Pengukuran Program/Kegiatan yang mendukung Pencapaian Kinerja Tahun 2022

Sasaran strategis	Indikator Sasaran	Target	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Program Peningkatan Pengembangan Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kelurahan yang berkinerja prima	50%	Program Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan	- penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan Panorama	420.797.800	102.025.242	24,2
				- penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan Jembatan Kecil	232.737.200	55.625.300	23,90
				- penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan Dusun Besar	375.714.600	62.948.500	16,75
				- penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan Padang Nangka	330.598.000		0

				- penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan Timur Indah	247.713.600	80.242.000	32,39
				penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan Lingkar Timur	373.799.120	41.624.800	11,23
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan PKK yang aktif	100%	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	- pembinaan dan fasilitasi lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan Panorama	29.981.800	5.431.800	18,11
				- pembinaan dan fasilitasi lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan Jembatan Kecil	29.600.400	5.484.000	18,52
				- pembinaan dan fasilitasi lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan Dusun Besar	29.985.200	3.981.050	13,27

				- pembinaan dan fasilitasi lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan Padang Nangka	26.765.400	0	0
				- pembinaan dan fasilitasi lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan Timur Indah	28.965.000	4.280.000	14,77
				- pembinaan dan fasilitasi lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan Lingkar Timur	26.854.000	0	0
	Persentase kelurahan yang menerapkan TTG	40%	-	-	-	-	

Dari tabel 3.6 di atas dapat dilihat bahwa untuk mencapai target persentase kelurahan yang berkinerja prima dilaksanakan 7(tujuh) kegiatan dan dalam mencapai persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang aktif dilaksanakan 7(tujuh) kegiatan

sedangkan untuk mencapai persentase kelurahan yang menerapkan TTG belum ada kegiatan yang dilaksanakan. Secara Umum pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam menunjang capaian kinerja program sudah sangat baik ditandai dengan tingkat realisasi anggaran dari masing – masing kegiatan mencapai di atas 92 %. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut sudah sangat baik dalam menunjang pencapaian target yang telah ditetapkan, akan tetapi pada capaian persentase kelurahan yang menerapkan TTG belum ada kegiatan yang dilaksanakan sehingga realisasinya masih 0. Untuk tahun yang akan datang akan diusahakan penganggaran pada kegiatan tersebut agar seluruh kinerja kecamatan dapat lebih maksimal.

BAB IV. P E N U T U P

Dengan selesainya penyusunan LKjIP tahun 2022 Kantor Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu yang merupakan salah satu sarana untuk mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN telah terpenuhi, Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Kecamatan Singaran Pati merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2022 yang disusun untuk menindak lanjuti Instruksi Presiden RI Nomor : 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini dapat juga digunakan sebagai media peningkatan kinerja serta sebagai umpan balik dalam pengambilan keputusan pihak-pihak terkait terutama digunakan oleh segenap jajaran pimpinan dan staf Kantor Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu Tahun 2022 ini, maka diharapkan dapat memberikan gambaran capaian kinerja target yang telah ditetapkan. Hasil Capaian Kinerja Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu Tahun 2022 adalah :

1. Capaian sasaran strategis Kecamatan Singaran Pati ditetapkan dengan indikator nilai evaluasi LkjiP Kecamatan dengan nilai capaian kinerja sebesar 0, dan dapat dikatakan belum berhasil. Hal ini disebabkan karena Pemerintah Kota Bengkulu melalui

Inspektorat Kota Bengkulu belum melakukan penilaian atas penyusunan LKjIP Kecamatan tahun sebelumnya.

2. Jika dilihat dari capaian kinerja program yang termuat dalam Sasaran Program Pembangunan Daerah, Kecamatan Singaran Pati melaksanakan Program Peningkatan Kapasitas Kecamatan dan kelurahan dan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Indikator dari capaian Program Peningkatan Kapasitas Kecamatan dan kelurahan adalah Persentase Kelurahan yang berkinerja prima dengan capaian kinerja sebesar 200% dan dapat dikatakan bahwa Kecamatan Singaran Pati telah berhasil.

b. Indikator dari capaian Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan terdapat 2 (dua) indikator yaitu :

- Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang aktif dengan capaian sebesar 100% dan dapat dikatakan berhasil
 - Persentase Kelurahan yang menerapkan TTG sebesar 0 %.
- Dengan demikian dari capaian kinerja ini Kecamatan Singaran Pati dikatakan belum berhasil.

Akan tetapi secara keseluruhan dari 3(tiga) indikator yang ditetapkan telah dapat dikatakan berhasil karena ada

satu indikator yang mencapai 200% dan telah melebihi target yang telah ditetapkan dan hanya ada satu indikator yang tidak terpenuhi.

Untuk memperoleh kinerja Kecamatan Singaran Pati sesuai dengan yang telah ditetapkan maka diupayakan di masa yang akan datang untuk mengalokasikan anggaran guna memfasilitasi penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) di kelurahan baik untuk penerapannya secara langsung maupun untuk kegiatan sosialisasi pengenalan TTG kepada masyarakat. Selain itu juga mengefisienkan penggunaan anggaran yang ada, memaksimalkan penggunaan sumber daya, baik sumber daya pegawai maupun sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan kepada masyarakat agar seluruh kegiatan yang dilaksanakan dapat menunjang pencapaian kinerja kecamatan secara keseluruhan.